



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE DAGING
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3. NHK : 644476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.360.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 5030 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, WARISAN Rp. 200.000.000		
4. Tanah Seluas 1950 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, WARISAN Rp. 80.000.000		
5. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, WARISAN Rp. 30.000.000		
6. Tanah Seluas 1229 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	275.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HADIAH Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 2DP-R Tahun 2019, HADIAH Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	250.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.176.317.607



F. HARTA LAINNYA

Rp. 820.000.000

Sub Total

Rp. 3.881.317.607

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.881.317.607

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.